

RUANG PUBLIK DAN KOMUNIKASI DIALOGIS ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS PROVINSI JAMBI

Public Sphere And Dialogical Communication Of Orang Rimba In Jambi Province Bukit 12 National Park

Pera Nurfathiyah¹⁾

Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Email : pera_nur@unja.ac.id

ABSTRACT

The Orang Rimba as a Remote Indigenous Community (KAT) are marginalized due to the government's policy of changing the function of forest land to oil palm and rubber plantations. This condition encourages development actors such as NGOs to carry out empowerment with public sphere and dialogical communication between jungle people and the government, private sector and NGOs in the form of physical public spaces in the form of dialogue and non-physical public spaces in the form of community radio. The objectives of this study are: (1) To explain physical and non-physical public sphere activities of jungle people in aspiring to their desires, (2) to explain the dialogical communication process in public sphere in discussing government policy issues. This research method is a literature study from research articles and books relating to public sphere and dialogical communication. This study uses a critical paradigm with a qualitative approach using critical, historical and practical theories in studying the public sphere as emancipatory. This case study research is aimed at conducting a study of public sphere as a form of dialogical communication between jungle people and stakeholders. The results showed that the public sphere in empowering jungle people was in the form of (1) discussion, dialogue and deliberation in overcoming forest tenure problems, (2) coaching at the NGO basecamp in facilitating formal schools, (3) coaching through Benor FM Radio to improve children's skills -Kids of Orang Rimba in technology

Keywords: Dialogical communication, empowerment, public sphere

ABSTRAK

Orang Rimba sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) mengalami marjinalisasi karena kebijakan pemerintah dalam alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan karet. Kondisi ini mendorong pada aktor pembangunan seperti LSM untuk melakukan pemberdayaan dengan ruang publik dan komunikasi dialogis antara orang rimba dengan pemerintah, swasta maupun LSM dalam bentuk ruang publik fisik berupa dialog dan ruang publik non fisik berupa radio komunitas. Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Menjelaskan aktivitas ruang publik fisik dan non fisik orang rimba dalam mengaspirasikan keinginan mereka, (2) Menjelaskan proses komunikasi dialogis di ruang publik dalam membicarakan masalah kebijakan pemerintah. Metode penelitian ini adalah studi literatur dari artikel hasil penelitian dan buku yang berkenaan dengan ruang publik dan komunikasi dialogis. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori kritis, historis dan bersifat praktis dalam mengkaji ruang publik sebagai emansipatoris. Penelitian studi kasus ditujukan untuk melakukan kajian ruang publik sebagai bentuk komunikasi dialogis antara orang rimba dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik dalam memberdayakan orang rimba adalah dalam bentuk (1) diskusi, dialog dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan penguasaan hutan, (2) pembinaan di basecamp LSM Warsi dalam memfasilitasi sekolah formal, (3) pembinaan melalui Radio Benor FM untuk meningkatkan keahlian anak-anak Orang Rimba dalam teknologi.

Kata kunci: Komunikasi dialogis, pemberdayaan, ruang publik

PENDAHULUAN

Orang Rimba merupakan suatu masyarakat lokal yang telah lama menghuni kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) di Provinsi Jambi. TNBD sebagai kawasan tempat tinggal Orang Rimba yang sebagian besar juga ditumbuhi oleh tumbuhan dan hewan asli setempat yang memberikan kontribusi dalam membentuk bentang alam (lanskap) selama beberapa generasi. Aktivitas Orang Rimba yaitu memanen sejumlah hasil hutan terutama produk hutan non kayu sehingga mereka sangat tergantung dengan sumber daya hutan sebagai sumber makanan dan tempat tinggal. Penetapan kawasan TNBD sebagai taman nasional dalam SK Menhutbun RI No. 258/Kpts-II/2000 memberikan legalitas dan jaminan ruang hidup Orang Rimba dalam mengakses sumber daya alam (SDA).

Keberadaan SK Menhutbun RI dalam beberapa tahun ini terjadi pergeseran kepentingan dengan kebijakan pemerintah pada era orde baru dengan pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi penanda eksploitasi hutan alam tropika di luar Jawa termasuk di Provinsi Jambi begitu nyata terjadi. Jumlah HPH tercatat 600 unit HPH dengan areal hutan produksi seluas 64 juta Ha pada tahun 2000. Menurut data dari Departemen Kehutanan, laju deforestasi nasional dalam 10 tahun terakhir telah mencapai 1,6 juta ha per tahun. Deforestasi terjadi disebabkan karena eksploitasi HPH seperti pada rezim Orde Baru, juga ditambah dengan maraknya kegiatan *illegal logging* sejak tahun 1999, pembukaan lahan untuk usahatani perkebunan rakyat dan perkebunan swasta, kebakaran hutan, dan perebutan kekuasaan atas lahan hutan (ekonomi politik) antara perusahaan HPH dengan masyarakat adat (Awang 2003; 2006; Wrangham 2003).

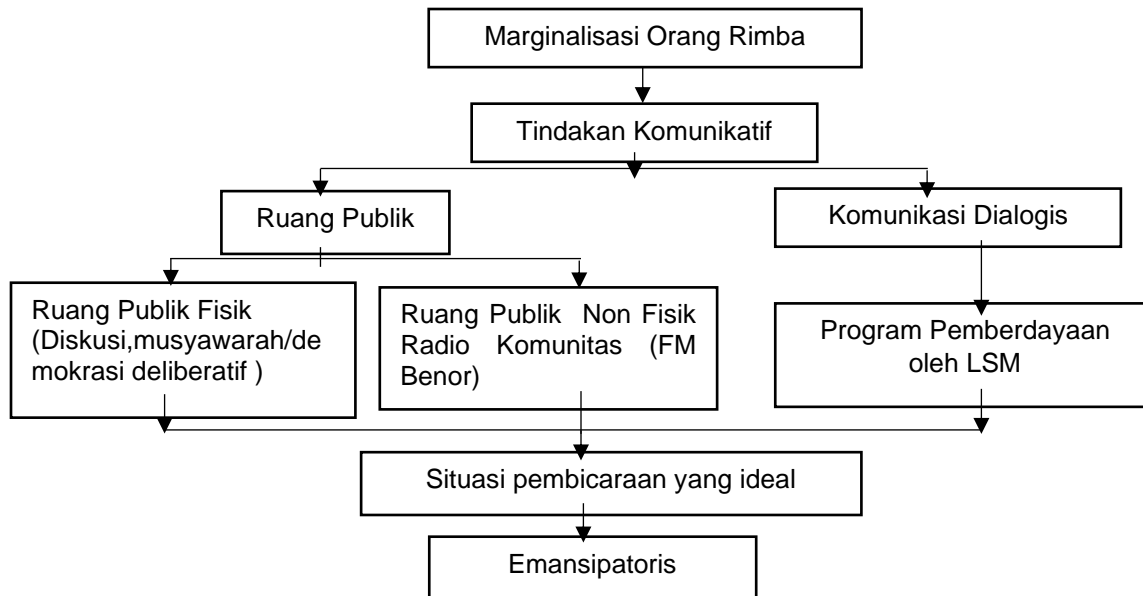
Dampak kebijakan HPH pada hutan adalah terjadinya deforestasi yang mengakibatkan kerusakan SDA. Kondisi ini telah terjadi pada masa kolonial dimana negara senantiasa menjadi puncak dari hukum, hal dan aturan serta memonopoli semua kewenangan, kekuasaan dan penyelenggaraan negara yang berlanjut dan mencapai klimaks pada masa orde baru (Dove 1983; Lynch & Harwell 2006) dimana negara memaknai secara sepihak berbagai aturan pengelolaan SDA sehingga memudahkan proses pengambilalihan hak-hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah untuk pemanfaatan yang lebih produktif. Kebijakan negara yang monopoli menimbulkan konflik komunitas Orang Rimba, negara dan swasta yang apabila cara seperti ini berlangsung dalam waktu yang lama dapat memperlemah komunitas Orang Rimba dalam hal : (1) ekonomi pasar yang telah mengubah pola dan orientasi ekonomi rakyat menjadi ekonomi yang pro-pasar. Hal ini dapat dilihat dari munculnya dominasi pasar atau semacam internasionalisasi ekonomi, (2) intervensi negara yang makin kuat sehingga menghancurkan tatanan sosial-kultural dan memarginalkan masyarakat lokal atau masyarakat adat dari kearifan yang dimiliki.

Hutan sebagai tempat hidup Orang Rimba yang terus menerus di eksploitasi menyebabkan Orang Rimba dihadapkan dengan berbagai persoalan saat ini, antara lain: (1) ekosistem TNBD yang telah berubah dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, karet dan termasuk HTI. Kondisi ini berakibat kepada penurunan sumber daya hutan yang bisa dimanfaatkan oleh Orang Rimba, (2) adanya perubahan cara-cara hidup Orang Rimba yang dipengaruhi budaya orang dari luar (masyarakat luar), hal ini menyebabkan Orang Rimba menjadi tidak berdaya sehingga ketidakberdayaan Orang Rimba menggugah berbagai aktor seperti LSM dan lembaga lainnya untuk melakukan pemberdayaan melalui pendidikan penyadaran dan advokasi untuk membangun kesadaran kritis Orang Rimba. Kesadaran kritis yang terbangun membentuk opini publik dan aspirasi yang mendorong Orang Rimba memperjuangkan keadilan sosial. Ruang publik terbentuk melalui media alternatif dalam bentuk komunikasi secara langsung, seperti forum-forum musyawarah sebagai bentuk demokrasi deliberatif yang mendorong terciptanya suasana dialogis dan kritis diantara mereka. Dialog kritis dalam berbagai bentuk komunikasi yang dibawakan lewat ruang sosial semi-otonom (ruang publik) membuat komunitas Orang Rimba berkesempatan untuk melakukan refleksi-diri dan berani melakukan resistensi memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian dari warga negara yang berdemokrasi. Artikel ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan aktivitas ruang publik Orang Rimba dalam mengaspresiasi keinginan mereka, (2) Menjelaskan proses komunikasi dialogis di ruang publik dalam membicarakan masalah kebijakan konservasi apakah berjalan secara emansipatoris atau ada dominasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari artikel hasil penelitian dan buku yang berkenaan dengan ruang publik dan demokrasi deliberatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori kritis Jurgen Habermas mazhab Frankfrut sebagai filosofi kritis, historis dan bersifat praktis dalam mengkaji ruang publik sebagai emansipatoris (McCharty 2015). Penelitian studi kasus ini melakukan kajian mengenai pemanfaatan ruang publik sebagai bentuk komunikasi dialogis antara pemangku kepentingan dengan Orang Rimba di wilayah TNBD Provinsi Jambi. Pendekatan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori ruang publik, tindakan Komunikatif dan komunikasi deliberatif dari Jurgen Habermas yang fokus kepada komunikasi antar subjek sebagai penyelesaian masalah dengan dialog tanpa tekanan dan intervensi sehingga menghasilkan konsensus.

Teori Tindakan Komunikatif Habermas menyediakan wadah untuk dijadikan analisis dalam melihat pemberdayaan Orang Rimba yang dilakukan oleh LSM sebagaimana idelanya komunitas sasaran seharusnya dijadikan subjek dari pemberdayaan tersebut bukan objek. Pendekatan teori tindakan komunikatif habermas mengatakan bahwa komunikasi yang dibangun harus berdasarkan *subject to subject*. Argument yang disampaikan masing-masing subjek yaitu Orang Rimba harus dilandasi pada 3 klaim komprehensibilitas yaitu (1) klaim ketepatan, (2) klain kebenaran, dan (3) klaim kejujuran.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran kondisi Orang Rimba

TNBD merupakan kawasan hutan lindung dan cagar biosfer yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 285/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus tahun 2000 tentang penunjukkan kawasan TNBD seluas 60.500 ha yang terletak di tiga kabupaten di Provinsi Jambi yaitu, Kabupaten Sarolangun (6.758 ha), Kabupaten Batanghari (41.259 Ha), dan Kabupaten Tebo (12.483 Ha). Ratusan tahun sebelum TNBD ditetapkan sebagai hutan lindung dan cagar biosfer, telah ada komunitas adat yang mendiami daerah ini yaitu Orang Rimba. Penetapan TNBD sebagai kawasan bagi kehidupan Orang Rimba menjadi legal dengan adanya SK dari menteri kehutanan.

Perubahan luas kawasan TNBD yang mulanya ditetapkan seluas 60.500 Ha, kini berkurang menjadi 54.780 Ha pada tanggal 10 Juni 2014 disebabkan karena banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet oleh perusahaan. Dominasi kapitalis yang didukung oleh corak demokrasi liberal, telah memunculkan yang disebut oleh Habermas sebagai kolonisasi. Kolonisasi itu terjadi manakala sistem pengendalian, yaitu uang (kapitalis) dan kekuasaan (negara) mendominasi sistem integrasi sosial dan budaya yang disebut sebagai dunia kehidupan.

Kebijakan pemerintah yang memberikan legalitas kepada perusahaan untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit dan karet secara tidak langsung menyebabkan Orang Rimba sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi marjinal. Kawasan hutan TNBD yang sumber pangan, sandang, papan bagi Orang Rimba menjadi terbatas karena telah dikuasai oleh perusahaan dan menjadi komoditas pasar. Kebijakan pemerintah memberikan dampak terhadap kehidupan Orang Rimba yang semakin memprihatinkan yaitu mereka terpaksa harus terusir dari hutan sehingga mereka tidak hanya tinggal di dalam TNBD, tapi terpaksa tinggal di jalan lintas, di desa-desa sekitar TNBD, di dalam perkebunan kelapa sawit bahkan berjalan berkilo-kilo sampai ke Provinsi Sumatera Barat untuk mencari penghidupan.

Orang Rimba di kawasan TNBD mengalami kekurangan pangan pada tahun 2015 sedikitnya 11 Orang Rimba di kawasan TNBD meninggal. Mereka diduga tewas akibat kekurangan pangan dan air bersih. Kemudian studi yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, dengan KKI Warsi tahun 2016, menemukan prevalensi hepatitis B di kalangan Orang Rimba di Jambi mencapai 33,9 persen. Sebanyak empat dari 10 orang anggota komunitas Orang Rimba mengidap penyakit hepatitis B (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), <http://warsi.or.id/>, diakses 3 Maret 2019). Marginalisasi Orang Rimba mengakibatkan terganggunya sistem ekologis dan tergerusnya tatanan sosial ekonomi kultural mereka karena struktur sosial masyarakat yang pro terhadap sistem kapitalis. Kontestasi pemanfaatan sumber daya hutan antara Orang Rimba versus PT. Wahana Printis dalam satu kasus di bagian timur TNBD, menegaskan bahwa praktek dominasi suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan dari negara yang berpihak kepada korporasi (kapitalis) untuk mengembangkan usahanya di dalam kawasan hutan dengan mengabaikan hak-hak komunal Orang Rimba masih terjadi sehingga melahirkan konflik diantara keduanya (Muchlis, F, 2017).

Ruang Publik Fisik Orang Rimba

Ruang publik Public sphere merupakan wilayah kehidupan sosial sehingga orang dapat mendiskusikan masalah kepentingan umum; di mana mereka dan dapat berdiskusi dan berdebat mengenai isu-isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa dibatasi oleh adat, dogma, dan kekuasaan, dan di mana mereka dapat menyelesaikan perbedaan pendapat melalui argument yang rasional sehingga terbentuk opini publik. Akses ke ruang publik dapat terbuka untuk semua masyarakat, masyarakat bertindak sebagai publik ketika berhadapan dengan urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa ada paksaan (Adult, 2012). Ruang publik sebagai arena untuk memberikan pengaruh yang tercipta saat individu melibatkan orang lain dalam berkomunikasi melalui percakapan, memberikan argumen, berdebat, berdiskusi tentang subyek yang menjadi perhatian atau permasalahan bersama yang dapat mempengaruhi komunitas yang lebih luas. Dalam ruang publik bukan hanya penyampaian kata-kata saja akan tetapi terjadi pertukaran visual dan tindakan simbolik non verbal seperti banner, foto, banner, film dan bentuk visual lainnya (Cox, 2010). Dalam artikel ini yang dibahas adalah percakapan, penyampaian argumen berupa diskusi, komunikasi non verbal yang terjadi dalam ruang publik Orang Rimba dan penggunaan media komunitas Orang Rimba. Ruang publik merupakan jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat. Kekuatan mencapai legitimasi dan pengalaman masyarakat serta memahami arah yang diinginkan masyarakat melalui dialog dalam ruang publik, sementara masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya agar dapat diakomodir oleh penguasa. Ruang publik dapat mewujudkan masyarakat yang bebas dari penindasan-penindasan, masyarakat yang egaliter, masyarakat yang dewasa dalam menanggulangi krisis yang mereka hadapi (Hardiman, 1993), hal ini disebabkan karena masyarakat yang terlibat dalam ruang publik memiliki status yang sama sehingga diskusi berlangsung secara terbuka, bebas dan menggunakan argument yg rasional.

Ruang publik tidak terbatas sebagai tempat pertemuan secara fisik saja melainkan sebagai merupakan wahana komunikasi warga dalam mereproduksi ruang di antara mereka (Arendt dan Habermas *dalam* Hardiman, 2009) sehingga ruang publik merupakan suatu keberagaman atau sebuah jejaring yang sangat kompleks dimana setiap bentuk persekutuan atau setiap komunitas dapat membangun sebuah ruang publiknya sendiri. Ruang publik menjadi penting karena didalamnya terjadi diskusi secara kritis tentang kepentingan publik yang terkait dengan hubungan antara negara dan masyarakat. Ruang publik meliputi seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan bagi pembentukan opini publik dan seluruh warga masyarakat berhak untuk memasuki dunia tersebut. Perbincangan mengenai kepentingan umum yang diikuti oleh orang-orang privat dapat ditemui dalam ruang publik. Forum perbincangan ini melibatkan individu yang akan bebas mengeluarkan pendapatnya dan bahkan mengemukakan opininya secara terbuka. Ruang publik ini dapat dikatakan sebagai kekuatan yang dipergunakan untuk refleksi kritis terhadap pemerintahan negara. Diskusi publik yang berlangsung akan membentuk opini yang dirasionalisasikan dan hanya dapat berlangsung dalam ruang publik.

Dalam ruang publik terjadi diskusi yang bebas, terbuka dan adil, sehingga suasana yang kondusif ini memungkinkan munculnya argumentasi-argumentasi kritis mengenai berbagai isu sehingga terjadi emansipasi. Emansipasi merupakan kemampuan untuk membebaskan diri dari segala dominasi yang dialaminya, sehingga seseorang mampu mengemukakan eksistensi diri atau pemikirannya. Proses emansipatori akan terjadi jika akses publik terhadap komunikasi terbuka dan mereka dapat terlibat sebagai subjek dalam proses komunikasi yang terkait dengan kepentingannya sehingga membebaskannya dari kesadaran palsu (*false consciousness*). Masyarakat madani (*civil society*) akan tercapai apabila kondisi masyarakat bertemu dan berdebat akan sesuatu secara kritis maka akan terbentuk apa yang disebut dengan masyarakat madani (*civil society*). Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berbagi minat, tujuan, dan nilai tanpa paksaan yang dalam teori dipertentangkan dengan konsep negara yang bersifat memaksa (Edgar 2006). Situasi kehidupan sosial yang memungkinkan komunikasi yang ideal menjadi persyaratan untuk terciptanya komunikasi yang ideal yang disebut oleh Habermas sebagai situasi pembicaraan yang ideal (*ideal speech situation*). Ranah publik yang sejati menurut Habermas adalah ranah publik yang memiliki situasi seperti ini. Pada pokoknya, situasi pembicaraan yang ideal itu adalah situasi di mana tidak ada ketimpangan kuasa antara orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan atau diskusi yang berlangsung (Edgar 2006).

Orang Rimba merupakan komunitas adat yang hidup dalam keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga program pemberdayaan yang dilakukan oleh aktor pembangunan bertujuan untuk membangun kesadaran kritis untuk melakukan tindakan komunikatif dalam bentuk ruang publik dan komunikasi dialogis untuk membangun opini publik. Ruang publik dalam penelitian ini adalah ruang dimana Orang Rimba terbebas dari intervensi hegemonis pemerintah dan swasta. Ruang publik dapat menciptakan opini publik yang menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan. Hal ini sesuai pendapat Paterson (2000) mengatakan bahwa dalam alam demokrasi, agenda kebijakan sangat dipengaruhi oleh opini publik dan kekuatan publik diperkuat oleh fakta bahwa opini diukur dan diperlakukan dengan penuh perhatian oleh pembuat kebijakan. Pemikiran Habermas tentang ruang publik dapat menjadi tawaran bagi munculnya kesepahaman bersama. Ruang publik mengacu pada kemungkinan-kemungkinan bagi rasionalisasi emansipatoris yang disembunyikan dan diancam oleh ideologi positivistik dari kesadaran teknokratik (Pusey 2011).

Ruang publik yang berwujud diskusi dan musyawarah antar Orang Rimba memberikan penyadaran kritis akan kondisi yang dialami orang rimba sehingga memunculkan tindakan komunikatif sebagai upaya untuk mencapai konsensus. Hal ini sesuai dengan pendapat Habermas (1996) bahwa proses mencapai konsensus terlaksana dalam apa yang disebut dengan diskursus praktis yang mengandaikan adanya situasi bicara ideal (*ideal speech situation*). Setiap peserta berupaya mencapai konsensus tentang aturan-aturan atau norma-norma hukum. Hukum di sini berfungsi sebagai jembatan antara tindakan komunikatif dan tindakan strategis yang diikat oleh tindakan komunikatif (Hardiman 2009). Penelitian Muchlis, F (2017) mengungkapkan bahwa konsensus dapat terjadi pada ruang publik Orang Rimba dengan mensyaratkan adanya "*intellectual organic*" dari NGO melalui pemberdayaan untuk melahirkan kesadaran kritis. Konsensus menjadi argumen terbaik Orang Rimba yang dibawa ke ruang politik negara untuk dipertentangkan dengan argumentasi penguasa "negara" dan modal " korporasi" yang di dalamnya juga

membawa kepentingan kapitalis. Kesadaran kritis secara kolektif juga menjadikan Orang Rimba “berani” melakukan “resistensi” mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak komunalnya.

Ruang Publik Non Fisik Orang Rimba

Ruang publik non fisik yang digunakan Orang Rimba dalam menyamapikan aspirasinya adalah radio komunitas yang dikenal dengan nama Benor FM. Radio komunitas Orang Rimba ini diinisiasi oleh KKI WARSI sebagai salah satu NGO yang fokus pada isu-isu konservasi dan Orang Rimba di Jambi. Lokasi Studio Benor FM berada di atas bukit sebelah selatan TNBD, Desa Bukit Suban (SPI), Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi (102° 32' 6.014" BT dan 1° 55' 7.179" LS). Waktu tempuh dari Bandara Sultan Taha menuju ke lokasi dibutuhkan waktu 5-6 jam dengan jarak sekitar 395 Km (Sukmareni, Hermayulis. 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Muchlis, F (2017), Benor FM dapat menjangkau sekitar 10-20 kilometer sehingga masyarakat luar yang tinggal di sekitar TNBD dapat mengakses Benor FM. Topografi TNBD yang berbukit menyebabkan Benor FM belum dapat diakses oleh semua kelompok Orang Rimba. Terdapat dua kelompok Tumenggung yang dapat dijangkau, yaitu Kelompok Tumenggung Nggrip Kedundung Muda dan Tumenggung Tarip di Sungai Semapui, Pakuhaji Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Upaya untuk mendekatkan radio Benor FM kepada Orang Rimba senantiasa diupayakan oleh aktor pembangunan seperti KKI Warsi membagikan 10 radio transistor di beberapa kelompok Orang Rimba yang tinggal di TNBD. Satu radio dipakai untuk beberapa keluarga. Pada Tahun 2014 yang lalu, ketika ada kunjungan Gubernur Jambi, Gubernur HBA saat itu membantu memberikan sumbangan 100 unit radio kepada Orang Rimba.

Kehadiran Benor FM sebagai radio komunitas dan sekaligus menjadi ruang publik yang ideal seperti yang dicita-citakan Orang Rimba. Radio sebagai media komunikasi bagi Orang Rimba untuk berbagi kegelisahan mengenai kondisi sosial, politis, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ruang publik ideal yang ditransformasikan jurnalisme warga tersebut diharapkan menjadi ruang bebas bagi warga negara untuk menyatakan sikap, gagasan, pandangan dan kritik terhadap kondisi sekitar. Benor FM sebagai media teknologi yang relatif baru dalam komunitas Orang Rimba, sehingga tak ada kelompok yang memiliki kekuasaan dalam menggunakan radio ini. Benor FM sebagai media baru dan institusi baru dibangun atas dasar kesadaran untuk membebaskan komunitas dari dominasi informasi kelompok dominan. Anak-anak muda Orang Rimba dapat mendorong Benor FM menjadi institusi yang relatif bebas dominasi dan berproses menjadi sebuah ruang publik yang diidealkan oleh Habermas. Eksistensi radio Benor FM bukan berarti tidak mungkin tergeser atau bahkan jatuh menjadi sistem baru yang kemudian juga menundukkan manusia dengan sistemnya jika Benor FM berada dibawah kekuasaan penguasa yang mengikuti pola-pola operasi media *mainstream* dengan segala tatanan administratif, jam siaran, sistem produksi teks, standar penyiaran dan lain-lain. Jika kondisi seperti ini terjadi maka kekuatan media komunitas yang menyatu dengan komunitasnya akan menjadi lemah karena sistemnya kemudian kembali menundukkan kepentingan komunitasnya.

Hasil penelitian Muchlis, F (2017) menunjukkan bahwa Radio Benor FM hadir sebagai media pemberdayaan sekaligus ruang publik Orang Rimba dalam memperjuangkan ruang kebebasan untuk menyatakan opini publik dan membangun wacana publik. Secara praktis, radio Benor FM merumuskan dan menyampaikan secara luas berbagai kepentingan-kepentingan Orang Rimba yang selama ini sering diabaikan oleh lembaga representasi-representasi. Kehadiran radio Benor FM menjadi salah satu cara untuk menyuarakan tentang adat istiadat dan tentang keseharian Orang. Waktu siaran radio Orang Rimba dari pukul 08.00-17.00 WIB, dengan penyiar asli Orang Rimba. Radio ini dikembangkan mulai tahun 2011, namun baru efektif beroperasi sejak tahun 2012.

Ruang publik berupa forum dialog antara Orang Rimba dengan pemerintah menurut hasil penelitian Nurhaliza (2018) ada dan mereka diberikan kesempatan untuk berdialog akan tetapi kurang efektif karena keterbatasan Orang Rimba dalam baca tulis sehingga sudah berkali-kali mereka memanfaatkan forum tersebut untuk mengadu dan berdialog tetapi mereka masih saja termarginalisasi. Hegemoni dan dominasi kekuasaan pemerintahan masih menguasai kebijakan sehingga Orang Rimba jarang diikutsertakan dalam proses pembangunan. Hal ini yang menjadi pemikiran Gramsci (1999), lewat konsep hegemoninya, ia

mengkhawatirkan keterpinggiran masyarakat karena adanya hegemoni dari pihak penguasa beserta kelompok-kelompoknya yang bersatu untuk mempertahankan eksistensi mereka.

Untuk mengatur tata sosial, hukum dan adat di komunitas Orang Rimba terdapat organisasi sosial di komunitas Orang Rimba. Struktur organisasi sosial pada Orang Rimba terdiri dari : (1) Tumenggung, merupakan Kepala adat atau pemimpin tertinggi di komunitas Orang Rimba (disebut sebagai *rajo*). Mereka berperan sebagai penegak hukum yang memutuskan perkara, pemimpin upacara ritual dan umumnya memiliki kemampuan dan kesaktian. (2) Depati, merupakan pengawas terhadap kepemimpinan tumenggung. (3) Mangku, adalah mereka yang memberikan aturan dan penimbang keputusan dalam sidang adat. (4) Menti, berperan sebagai hakim dalam menyidang Orang Rimba secara adat. (5) Anak Dalam adalah orang kepercayaan Mangku dan mengkaji jika terjadi kesalahan rakyat. (6) Debalang Batin adalah Pengawal Tumenggung. (7) Tengganas/Tenggana, adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sidang adat yang dapat membatalkan keputusan, dan (8). Jenang, adalah penghubung Orang Rimba dengan orang luar (Sukmareni, Hermayulis. 2013).

Orang Rimba melakukan tindakan komunikatif melalui musyawarah di tingkat internal mereka yang didampingi oleh NGO sebagai fasilitator dan memberi masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Orang Rimba. Pilihan musyawarah dalam beberapa tahapan merupakan bentuk demokrasi deliberatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Habermas. Kata "deliberasi" berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang artinya "konsultasi", "menimbang-nimbang", "atau musyawarah". Demokrasi deliberatif dalam bentuk musyawarah akan meningkatkan intensitas partisipasi Orang Rimba dalam proses pembentukan aspirasi dan opini, agar resistensi memperjuangkan hak-hak komunalnya murni kepentingan komunitas, bukan sebagian orang dan memenuhi harapan seluruh warga dalam komunitas. Musyawarah antar temenggung dan anggota komunitas membuka ruang bagi setiap peserta memiliki akses atau kesempatan yang sama untuk menyampaikan unek-uneknya terkait dan mereka bebas berbicara dan tidak dibatasi. Pandangan yang sama terhadap isu, yakni kepentingan akan adanya ruang hidup sebagai sumber pangan dan ekonomi utama mereka yang telah diklaim dimiliki oleh perusahaan dan telah ditanami pohon karet. Isu yang sama dan diangkat dalam forum musyawarah menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi nasib semua anggota komunitas.

Ruang publik yang terbentuk dari hasil musyawarah diarahkan pada pencapaian tujuan emansipatoris (membebaskan) komunitas Orang Rimba dari kekuatan-kekuatan ideologi dan kepentingan pribadi, kepentingan kekuasaan dan ekonomi, sehingga diskursus akan ditentukan oleh kekuatan argumentasi yang terbaik (*ideal speech situation*). Ruang publik yang kondusif memerlukan akses informasi yang terus menerus tentang tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan secara bersama, sehingga diperlukan advokasi untuk membangun *rational-critical deliberation* dalam pembentukan opini publik yang dilakukan oleh NGO KKI-Warsi. Kegiatan musyawarah di antara empat temenggung yaitu Nyenong, Marituha (sekarang digantikan oleh Menyurau karena meninggal dunia), Ngamal, Nyenong dan Ngirang menjadi basis membangun soliditas di komunitas sebelum mereka mendatangi kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari dan melakukan protes atas dibukanya lahan mereka oleh PT WP.

Komunikasi Dialogis sebagai upaya pemberdayaan Orang Rimba

Komunikasi dialog merupakan komunikasi transaksional antara pengirim (*sender*) dengan penerima (*receiver*) dalam menyampaikan pesan sehingga terjadi interaksi dan terjadi pemaknaan yang sama dalam periode waktu tertentu pada waktu tertentu. Dialog merupakan bentuk tindakan komunikasi yang menurut Habermas (2012) peserta yang terlibat dalam suatu dialog sebelum melakukan dialog harus memenuhi persyaratan yaitu : (1) bahwa tindakan yg diindikasikan lewat *speech* merupakan yg paling efektif dan efisien sebagai alat untuk mencapai tujuan, (2) bahwa tindakan itu adalah benar dan pantas sesuai dengan norma yang berlaku, (3) bahwa pengalaman subjektif sebagaimana yang diekspresikan pada tindakan *speech* itu adalah tulus dan autentik. Peserta yang melakukan dialog sebelum berbicara atau merespon pembicaraan orang lain melakukan komunikasi intrapersonal dengan dirinya sendiri. Peserta dalam dialog tidak memiliki kedaulatan ego dan membangun kesadaran diri untuk saling mengenal, menghormati dan berbagi pembicaraan (Muchlis, 2017). Dalam dialog tidak ada yang menjadi objek komunikasi, semua peserta dialog memiliki hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya secara rasional dan jujur, tidak

ada tekanan dari orang lain dan merupakan suara yang berasal dari hati nuraninya tanpa ada paksaan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Komunikasi dialog merupakan kunci dari pemberdayaan (Cangara, 2019) hal ini diperkuat oleh pendapat Freire (2000) bahwa dalam proses pemberdayaan terdapat proses penyadaran kritis yang menghendaki setiap orang yang terlibat dalam dialog menyadari kondisi dirinya melalui refleksi dan tindakan totalitas, penyadaran kritis tersebut dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk dialog. Narayan (2002) mengungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu perluasan aset dan kemampuan orang untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi dengan cara memberikan pengaruh, mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban lembaga dalam hal ini penguasa pembuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Penelitian ini menggunakan teori kritis yakni Tindakan Komunikatif Habermas sebagai landasan dalam melihat aktivitas pemberdayaan Orang Rimba yang dilakukan oleh aktor pembangunan yaitu KKI Warsi. Gagasan utama dalam Tindakan Komunikatif yang disampaikan Habermas yaitu komunikasi membuka jalan untuk saling memahami antar aktor sehingga sampai kepada konsensus atau kesepakatan bersama. Konsensus dapat dicapai melalui dialog yang dibangun, yaitu kebenaran subjektif masing-masing aktor dikomunikasikan sehingga mencapai kebenaran intersubjektif. Alat yang digunakan disini yaitu bahasa. Dialog ini dibangun melalui komunikasi aktif antara Orang Rimba dengan fasilitator dengan cara hidup bersama Orang Rimba dan berbahasa serta melakukan cara-cara seperti mereka agar diterima dalam komunitas Orang Rimba sehingga memudahkan dalam melakukan pemberdayaan nantinya. Kondisi kehidupan Orang Rimba yang mengalami marginalisasi akibat kebijakan pemerintah menjadi perhatian aktor pembangunan yaitu KKI Warsi dan lembaga lainnya untuk membantu Orang Rimba keluar dari permasalahan mereka. Terdapat beberapa program pemberdayaan yang dilakukan oleh KKI Warsi (Nurhaliza, 2018), yaitu :

1. Memfasilitasi Pendidikan Anak-anak Rimba

Fokus pendidikan yang dibina oleh KKI Warsi melakukan pemberdayaan terhadap Orang Rimba pada fokus bidang pendidikan baca tulis hitung (BTH). Pembinaan dibedakan menjadi 2 bentuk berdasarkan lokasi pembinaan yang terdiri dari :

(1) Pembinaan pendidikan di Basecamp KKI Warsi

Pembinaan pendidikan anak-anak rimba yang dilakukan di *basecamp* KKI Warsi yang berada di TNBD bagian selatan, secara administrasi berada di Desa Bukit Suban. Terdapat delapan orang anak-anak rimba yang tinggal dan dibina di *basecamp* KKI Warsi yang semuanya laki-laki. Rentang usianya yaitu 6 tahun – 15 tahun. Kedelapan orang ini merupakan anak-anak yang memiliki keinginan untuk belajar dan mendapat izin dari orangtuanya untuk dibina oleh KKI Warsi. Pembinaan pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk memampukan anak-anak rimba membaca, menulis, dan berhitung (BTH) termasuk membiasakan mereka agar dapat hidup sehat, bersih, dan teratur.

(2) Pembinaan kelas jauh

Pembinaan dilakukan secara jarak jauh yang dilakukan oleh fasilitator dengan cara kunjungan ke masing-masing kelompok Orang Rimba yang ada di TNBD yang terdiri dari kelompok Air Hitam, Kejasung, Terab, dan Makekal. Waktu kunjungan fasilitator ke masing-masing kelompok tidak menentu, biasanya sekali dua minggu atau bahkan sekali sebulan. Waktu kunjungan fasilitator berada di kelompok berkisar antara 5 – 1 minggu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kesiapan anak Orang Rimba yang kehidupannya masih nomaden. Dari data yang didapatkan berdasarkan studi literatur hasil penelitian diperkirakan sekitar 79 orang anak yang ikut dalam program pembinaan kelas jauh.

2. Respon Orang Rimba terhadap Ilmu Pengetahuan

(1) Pendidikan Alternatif oleh KKI Warsi

KKI Warsi melakukan pemberdayaan dibidang pendidikan melalui tiga aktivitas yaitu : (1) pembinaan di *basecamp* KKI Warsi untuk memampukan anak-anak rimba baca, tulis, dan hitung (BTH) dan hidup bersih, sehat, serta teratur, (2) kelas jauh dengan pembelajaran BTH, (3) peningkatan *softskill* anak-anak rimba

dengan media Radio Benor FM. Ketiga aktivitas yang dilakukan ini diharapkan mereka dapat meningkatkan kapasitas melek huruf dan teknologi informasi. Dari hasil komunikasi dialogis disepakati bahwa aktivitas pendidikan yang dilakukan KKI Warsi mendapat dukungan dengan syarat harus tetap sesuai dengan norma dan nilai yang dianut Orang Rimba, seperti aturan perempuan dibatasi berinteraksi dengan masyarakat luar sehingga tidak mendapat dukungan dari keluarga untuk berpendidikan. Kemudian tidak ada larangan bagi anak-anak yang dibina KKI Warsi untuk tetap melakukan ritual budayanya sewaktu-waktu seperti melangun. Namun dari total keseluruhan Orang Rimba yang ada di TNBD berjumlah 3205 jiwa, hanya 97 anak yang mengikuti kelas jauh dan delapan anak yang dibina di *basecamp* KKI Warsi. Orang Rimba masih banyak memiliki anggapan bahwa pendidikan hanya untuk masyarakat luar, sedangkan Orang Rimba tidak membutuhkan pendidikan untuk hidup dan mencari makan di dalam hutan.

(2). Sekolah Formal

Anak yang sudah bisa berjalan bagi Orang Rimba dianggap sudah bisa membantu orang tuanya seperti membantu Induknya (Ibunya) mencari bahan pangan di hutan seperti mencari umbi-umbian dan menangkap ikan. Orang Rimba yang sudah memiliki ladang, maka anak-anak membantu induknya menjaga ladang dari hama monyet. Ubi kayu merupakan tanaman yang umumnya ditanam untuk makanan sehari-hari, sehingga Orang Rimba beranggapan bahwa tabu untuk menyuruh anaknya kesekolah. Orang Rimba tidak terbiasa menyiapkan kebutuhan anak kesekolah. Anak Orang Rimba harus membantu orang tuanya, sehingga anak-anak Orang Rimba yang bersekolah biasanya yang diminta, diajak dan dibiayai sekolahnya oleh fasilitator KKI Warsi.

Anak-anak Orang Rimba yang bersekolah dan dibina KKI Warsi umumnya laki-laki. Bagi Orang Rimba, hanya laki-laki yang boleh berpisah tempat tinggal dari orangtuanya. Sementara anak perempuan diwajibkan mengikuti dan tinggal bersama Orangtua. Kegiatan anak perempuan rimba umumnya membantu orangtuanya mencari bahan makanan di hutan dan menjaga ladang bagi yang memiliki ladang. Mulai sekitar pukul 06:00 pagi sampai matahari tenggelam mereka diwajibkan menjaga ladang dari hama monyet. Kewajiban ini didasarkan atas budaya rimba yang menganut sistem matrilineal.

Kegiatan pemberdayaan melalui komunikasi dialogis antara Orang Rimba dengan fasilitator Warsi berlangsung secara dialog yang menggunakan prinsip Habermas. Habermas (2012) mengatakan bahwa dialog dibangun dalam komunikasi dialogis dilakukan tanpa paksaan. Dialog antara aktor pembangunan dengan Orang Rimba dilakukan tanpa paksaan dengan memengang prinsip klaim agar tercapai suatu aksi komunikasi yang ideal yaitu :

1. Klaim ketepatan

Adanya kesepakatan yang dibangun oleh aktor komunikasi dalam hal ini KKI Warsi dengan Orang Rimba berupa norma dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh Orang Rimba yang tidak boleh dilanggar. Hal ini dilakukan agar dialog berjalan dengan lancar dan kegiatan pemberdayaan dapat diterima dengan kesadaran penuh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Klaim ketepatan memberikan pengetahuan bagi Orang Rimba bahwa tujuan pemberdayaan merupakan tujuan mereka juga. Klaim ketepatan memungkinkan kedua aktor saling memahami norma dan nilai yang dimiliki oleh masing-masing aktor, sehingga dialog yang berdasarkan pada norma dan nilai dari masing-masing aktor dapat dipadukan menjadi saling memperkuat kegiatan pemberdayaan. Budaya Orang Rimba yang meminimalisir perempuan rimba untuk bersentuhan dengan budaya orang Terang menyebabkan kegiatan pemberdayaan dilakukan secara bertahap untuk sampai kepada perempuan rimba.

2. Klaim kebenaran

Komunikasi dialogis yang dilakukan kedua aktor ini dalam memenuhi syarat kebenaran yaitu masing-masing mengungkapkan kebenaran subjektif agar tercapainya kebenaran intersubjektif. Komunikasi yang terjadi memperlihatkan kesukaan dan ketidaksukaannya terhadap cara-cara tertentu. Aktor pembangunan dalam hal ini KKI Warsi hidup bersama Orang Rimba selama bertahun-tahun sehingga untuk melakukan observasi kepada kehidupan sehari-hari Orang Rimba, sehingga komunikasi dialogis yang terjadi memperlihatkan realita yang sebenarnya dari masing-masing aktor. Kedua aktor yang melakukan komunikasi dialogis harus dapat menjadi pendengar dalam mencari titik temu dari perbedaan pendapat dari masing-masing sehingga aturan yang disampaikan dapat diterima sebagai sebuah kata sepakat atau konsensus. Klaim ini dapat memberikan kesempatan kepada kedua aktor terutama Orang Rimba untuk

memberikan argumen kepada aktor pembangunan mengenai apa yang menjadi kebutuhan Orang Rimba dalam kehidupannya agar dapat memampukan mereka melalui kegiatan pemberdayaan yang ditawarkan oleh aktor pembangunan.

3. Klaim kejujuran,

Program pemberdayaan terhadap Orang Rimba dilakukan melalui dialog yang didasarkan pada kejujuran. Kegiatan pemberdayaan dimulai dari perencanaan sampai evaluasi dan monitoring dilakukan berdasarkan dialog. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Nurhaliza, 2018) bahwa kegiatan pemberdayaan Orang Rimba merupakan dialog yang berdasarkan pada kejujuran. Harus adanya kesesuaian antara yang didalam pikiran, perkataan, dan perbuatan masing-masing aktor. Keberpihakan KKI Warsi sebagai LSM terhadap pengembangan kehidupan Orang Rimba khususnya pendidikan saat ini menjadikan KKI Warsi memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak rimba dalam menunjang pendidikannya. KK Warsi memberikan bantuan berupa buku, peralatan menulis, tas, sepatu, baju sekolah, transportasi maupun makan tiga kali sehari dan tempat tinggal untuk mengatasi keterbatasan dalam pendidikan Orang Rimba.

Menurut Habermas (2012) pemberdayaan dengan klaim kejujuran ini harus konsisten dilakukan, begitu juga dengan pembinaan pendidikan yang dilakukan KKI Warsi di Desa Bukit Suban telah konsisten dilakukan dari tahun 2007 sampai saat ini. Habermas mengatakan bahwa dialog dapat terjadi jika ada kejujuran dalam menyampaikan pendapat, hal ini terjadi di ruang-ruang publik Orang Rimba, seperti di hutan, sudung, *basecamp* KKI Warsi dan sebagainya dengan catatan dialog tersebut harus berisi 3 klaim kebenaran di atas. Ruang publik berfungsi sebagai menyelesaikan masalah yang dihadapi Orang Rimba melalui berdiskusi dan debat secara bebas dari tekanan manapun agar tercapai konsensus yang rasional dikedua aktor dalam kegiatan pemberdayaan pendidikan Orang Rimba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ruang publik Orang Rimba di TNBD terdiri dari ruang publik fisik dan ruang publik non fisik. Ruang publik fisik berupa diskusi dan musyawarah sedangkan ruang publik non fisik berupa radio komunitas FM Benor
2. Komunikasi dialogis yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan berlangsung secara demokrasi deliberatif dan memenuhi persyaratan terjadinya komunikasi yang ideal antara aktor pembangunan dalam hal ini KKI Warsi dengan Orang Rimba yaitu adanya klaim ketepatan dalam menyampaikan pendapat, klaim kebenaran dan klaim kejujuran.

Saran

Ruang publik fisik, non fisik dan komunikasi dialogis antara Orang Rimba dengan Orang Rimba dan Orang Rimba dengan aktor pembangunan masih perlu ditingkatkan intensitasnya sebagai wujud hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Agar kegiatan pemberdayaan kepada Orang Rimba dapat dilakukan secara berkelanjutan diperlukan pendekatan dialog dan budaya Orang Rimba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adut A 2012. A Theory of the Public Sphere. *Sociological Theory* 30(4) 238–262© American Sociological Association DOI: 10.1177/0735275112467012 <http://stx.sagepub.com>.
- Awang, S. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta (ID): Kreasi Wacana
- Cangara, H, 2019. Komunikasi Pembangunan. Telaah Untuk memahami konsep, filosofi, serta peranan komunikasi terhadap pembangunan dan pembangunan komunikasi dan era digital. Rajawali Pers. Cetakan 1. Juni 2020. Depok. ISBN : 978-623-231-384-2
- Dove M. 1983. Theories Of Swidden Agriculture And The Political Economy Of Ignorance. *Agroforestry Systems* 1(2):85-99.
- Edgar A. 2006. *Habermas: The Key Concepts*. Oxon (US): Routledge

- Freire. 2000. Pendidikan Kaum Tertindas (Terj). Jakarta (ID): LP3ES
- Gramsci A. 1999. *Selected From Prison Notebook*. London (GB): Lawrence & Wishart.
- Habermas, 2012. Ruang Publik. Sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis. Penerjemah Yudi Santoso. Cetakan keempat. Penerbit Kreasi wacana. Bantul. ISBN : 979-3722-81-9
- Habermas, 2012. *Ruang Publik, Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Penerjemah Yudi Santoso. Yogyakarta (ID): Kreasi Wacana
- Habermas, 1996. *Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge (GB) : MIT Press.
- Hardiman, 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme menurut Jurgen Habermas, Yogyakarta (ID): Kanisius.
- Hardiman, 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta (ID): Kanisius
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), <http://warsi.or.id/>, diakses 3 Maret 2019).
- Mc.Charty T 2015. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Bantul (ID): Kreasi Wacana.
- Muchlis, Fuad. 2017. *Praktik Komunikasi Dalam Pemberdayaan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi*. Bogor: *Disertasi* Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Narayan, D. (Ed.) (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook . Washington, DC: The World Bank
- Nurhaliza, S. 2018. Pemberdayaan pendidikan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) oleh KKI Warsi. *Jurnal Sosial Budaya* (e-ISSN 2407-1684 | p-ISSN 1979-2603) Vol. 15, No. 2, Desember 2018. Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Pusey M. 2011. Habermas: Dasar dan Konteks Pemikirannya. Yogyakarta (ID): Resist Book.
- Paterson. 2000. *Understanding Global Environmental Politics: Domination Accumulation and Resistance*. New York (US): St. Martin"s. (Pusey 2011).
- Sukmareni, Hermayulis. 2013. *22 Tahun WARSI Bersama Masyarakat*. Jambi (ID): KKI Warsi.